

**EVALUASI KEBIJAKAN PENATAAN PARKIR PADA AREA SHUTTLE,
DAN PERPUSTAKAAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS
PELAYANAN MAHASISWA DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Tugas Skripsi)

Oleh

Farah Diba Putri Khotima

NPM 2416041103



**PROGRAM STUDI ILMU ADMNISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2025

BAB I

PENDAHULUAN

Transportasi merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat di era modern. Keberadaannya bukan hanya memfasilitasi mobilitas dari satu tempat ke tempat lain, tetapi juga menjadi sarana penting dalam mendukung aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan. Di Indonesia, laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi secara langsung memengaruhi peningkatan jumlah kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat. Kondisi ini membuat transportasi pribadi menjadi pilihan utama bagi masyarakat, termasuk di kalangan mahasiswa, yang setiap hari dituntut untuk memiliki mobilitas tinggi dalam menjalankan aktivitas akademik maupun non-akademik. Mahasiswa sebagai kelompok pengguna transportasi yang dominan di kawasan kampus menjadikan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, sebagai moda transportasi paling efektif karena praktis, cepat, dan ekonomis (Abdul Karim et al. 2023).

Seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berdampak langsung terhadap meningkatnya kebutuhan akan transportasi, khususnya kendaraan bermotor. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri) tahun 2025, jumlah kendaraan bermotor di Indonesia telah mencapai sekitar 168 juta unit. Dari jumlah tersebut, sepeda motor mendominasi dengan angka 140,9 juta unit, disusul mobil penumpang sebanyak 20,5 juta unit, mobil barang 6,2 juta unit, serta sisanya kendaraan jenis lain. Data tersebut menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi di Indonesia dalam dua dekade terakhir (Korlantas Polri, 2025).

Fenomena ini membawa konsekuensi logis berupa meningkatnya kebutuhan akan ruang parkir. Kendaraan yang semakin banyak menuntut adanya ketersediaan lahan

parkir yang seimbang agar aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan tidak diiringi dengan penyediaan fasilitas parkir yang memadai. Hal ini menimbulkan berbagai permasalahan baru, seperti keterbatasan lahan parkir di pusat-pusat keramaian, munculnya praktik parkir liar, hingga meningkatnya risiko kehilangan kendaraan. Permasalahan tersebut tidak hanya terjadi di kawasan perkotaan besar, tetapi juga merambah ke kawasan pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi, tempat di mana mobilitas masyarakat juga sangat tinggi.

Dalam perspektif administrasi publik, penyediaan fasilitas parkir dapat dipandang sebagai bagian dari pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara. Parkir termasuk dalam kategori pelayanan pendukung yang sangat penting, karena berhubungan langsung dengan kenyamanan, keamanan, dan efektivitas mobilitas pengguna layanan, baik itu masyarakat umum maupun civitas akademika di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan demikian, kualitas pengelolaan parkir bukan hanya persoalan teknis manajemen ruang, tetapi juga menjadi indikator kinerja pelayanan publik.

Pengalaman di beberapa perguruan tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa isu parkir bukanlah hal sepele. Universitas Indonesia (UI) misalnya, telah mengimplementasikan sistem parkir berbasis kartu akses elektronik untuk meminimalisasi parkir liar dan menjamin keamanan kendaraan. Universitas Gadjah Mada (UGM) mengembangkan sistem parkir terintegrasi dengan data mahasiswa, sehingga akses lebih terkontrol dan transparan. Sementara itu, Universitas Brawijaya (UB) Malang sempat menerapkan kebijakan larangan mahasiswa baru membawa kendaraan ke kampus sebagai upaya mengurangi kepadatan lahan parkir, meskipun kebijakan tersebut menimbulkan pro dan kontra. Kasus serupa juga dilaporkan di beberapa universitas swasta, di mana keterbatasan lahan parkir menjadi keluhan utama mahasiswa, terutama pada jam sibuk perkuliahan (Nabal, 2020).

Berbagai fenomena tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan parkir di lingkungan pendidikan tinggi merupakan isu yang kompleks. Tidak hanya terkait dengan ketersediaan lahan, tetapi juga menyangkut aspek kebijakan, keamanan, kenyamanan, dan kepuasan pengguna. Oleh sebab itu, penelitian mengenai evaluasi kebijakan parkir, khususnya di perguruan tinggi negeri, menjadi penting dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan.

Perguruan tinggi merupakan salah satu pusat aktivitas dengan intensitas mobilitas yang tinggi. Ribuan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, serta pengunjung setiap hari keluar masuk lingkungan kampus untuk menjalankan berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik. Kondisi ini menuntut adanya fasilitas transportasi yang memadai, termasuk sarana parkir sebagai pendukung utama kelancaran aktivitas harian.

Mahasiswa sebagai kelompok terbesar dalam komunitas perguruan tinggi umumnya mengandalkan kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, sebagai moda transportasi utama. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti fleksibilitas waktu, keterjangkauan biaya, serta aksesibilitas yang lebih mudah dibandingkan transportasi umum. Di banyak daerah, termasuk di Bandar Lampung, pilihan transportasi umum masih terbatas dari segi jumlah maupun jangkauan. Kondisi ini menjadikan kendaraan pribadi sebagai alternatif utama mahasiswa untuk datang ke kampus.

Universitas Lampung (UNILA) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera yang memiliki jumlah mahasiswa aktif mencapai 48.720 orang. Jika sebagian besar mahasiswa menggunakan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, maka kebutuhan akan lahan parkir otomatis meningkat signifikan setiap tahunnya. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi manajemen kampus dalam menyediakan fasilitas parkir yang tidak hanya mencukupi dari segi kapasitas, tetapi juga terjamin dari aspek kenyamanan dan keamanan.

Pentingnya fasilitas parkir di lingkungan kampus tidak bisa dipandang sebelah mata. Keberadaan lahan parkir yang terkelola dengan baik akan memengaruhi

kelancaran aktivitas akademik mahasiswa. Misalnya, mahasiswa yang datang terlambat karena kesulitan mencari lahan parkir dapat terganggu konsentrasinya dalam mengikuti perkuliahan. Begitu pula dosen yang kesulitan memarkir kendaraan bisa berdampak pada keterlambatan jadwal mengajar. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa menurunkan kualitas proses belajar mengajar yang seharusnya berjalan efektif.

Selain itu, isu keamanan kendaraan juga menjadi perhatian serius. Berbagai kasus kehilangan kendaraan yang terjadi di lingkungan kampus, baik di UNILA maupun di universitas lain, menunjukkan bahwa sistem parkir yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan kerugian besar bagi mahasiswa. Fasilitas parkir yang tidak teratur, minim pengawasan, atau tanpa sistem keamanan yang jelas seringkali menjadi celah terjadinya tindak kriminal. Hal ini menuntut adanya kebijakan yang tepat dari pihak kampus untuk memberikan perlindungan bagi pengguna layanan.

Dalam perspektif administrasi publik, kebutuhan akan fasilitas parkir bagi mahasiswa tidak hanya sebatas persoalan teknis penyediaan lahan. Lebih jauh, hal ini menyangkut hak mahasiswa sebagai penerima layanan publik di bidang pendidikan tinggi. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara layanan berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, termasuk menyediakan sarana pendukung yang memadai. Dengan demikian, penyediaan fasilitas parkir yang layak merupakan bagian integral dari tanggung jawab institusi pendidikan dalam memberikan pelayanan prima kepada sivitas akademika.

Oleh sebab itu, penelitian mengenai kebijakan parkir di UNILA penting dilakukan untuk memahami sejauh mana kebijakan yang ada saat ini mampu menjawab kebutuhan mahasiswa sebagai pengguna utama layanan parkir. Apakah kebijakan tersebut telah efektif dalam menyediakan kapasitas yang mencukupi, menjamin keamanan kendaraan, serta meningkatkan kenyamanan mahasiswa dalam beraktivitas di lingkungan kampus? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam agar hasil penelitian dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi perbaikan kualitas pelayanan publik di UNILA.

Dalam perspektif ilmu administrasi publik, fasilitas parkir di perguruan tinggi tidak dapat dipandang hanya sebagai kebutuhan teknis semata, melainkan sebagai bagian dari pelayanan publik yang wajib diselenggarakan secara optimal. Pelayanan publik sendiri dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa sebagai pengguna utama layanan pendidikan berhak memperoleh pelayanan pendukung yang layak, termasuk layanan parkir.

Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur kepada masyarakat. Prinsip ini berlaku pula bagi perguruan tinggi negeri sebagai institusi yang menyelenggarakan pendidikan dengan dukungan fasilitas publik. Artinya, kebijakan penyediaan dan pengelolaan lahan parkir di lingkungan kampus tidak hanya merupakan kebijakan internal, tetapi juga merupakan perwujudan dari pemenuhan hak mahasiswa sebagai penerima layanan publik.

Dalam literatur administrasi publik, terdapat beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pelayanan publik. setidaknya ada tiga indikator penting, yaitu efektivitas, efisiensi, dan responsivitas. Efektivitas merujuk pada sejauh mana pelayanan publik mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks parkir kampus, efektivitas dapat diukur dari kemampuan kebijakan parkir menyediakan lahan yang cukup dan sistem keamanan yang andal. Efisiensi berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang ada secara optimal untuk memberikan pelayanan. Misalnya, bagaimana lahan parkir yang terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Responsivitas menggambarkan sejauh mana penyelenggara pelayanan mampu mendengarkan dan menanggapi keluhan maupun kebutuhan mahasiswa terkait fasilitas parkir.

Selain itu, konsep pelayanan publik juga menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menjelaskan kebijakan yang diambil kepada mahasiswa, termasuk dalam hal penarikan biaya parkir (jika ada), mekanisme pengawasan, hingga prosedur penanganan kehilangan kendaraan. Dengan adanya akuntabilitas, mahasiswa akan merasa lebih terlindungi dan memiliki kepercayaan bahwa hak-hak mereka sebagai pengguna layanan dihargai.

Dalam konteks Universitas Lampung, penyediaan dan pengelolaan parkir menjadi bagian penting dari tanggung jawab institusi untuk menciptakan lingkungan akademik yang kondusif. Parkir yang tertata dengan baik bukan hanya mendukung kelancaran aktivitas belajar mengajar, tetapi juga menunjukkan keseriusan kampus dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sebaliknya, pengelolaan parkir yang kurang terencana dapat menimbulkan ketidakpuasan, keresahan, bahkan kerugian materiil bagi mahasiswa, seperti kasus kehilangan kendaraan yang beberapa kali terjadi di lingkungan kampus.

Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan parkir di UNILA tidak bisa dilepaskan dari perspektif administrasi publik. Kebijakan tersebut harus dinilai berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang dan dikembangkan dalam teori administrasi. Hanya dengan cara inilah evaluasi dapat memberikan gambaran objektif mengenai kekuatan dan kelemahan kebijakan parkir yang sedang dijalankan, serta menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan ke depan.

Permasalahan parkir tidak hanya dialami oleh Universitas Lampung, tetapi juga hampir seluruh perguruan tinggi besar di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan lahan parkir yang memadai merupakan isu nasional dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Setiap perguruan tinggi memiliki karakteristik dan pendekatan berbeda dalam menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga menarik untuk ditelaah sebagai bahan perbandingan.

Sebagai contoh, Universitas Indonesia (UI) telah lama menghadapi masalah keterbatasan lahan parkir, terutama di kawasan Depok yang padat aktivitas. Untuk

mengatasi hal ini, UI menerapkan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor bagi mahasiswa dengan mendorong penggunaan sepeda, bus kampus (yellow bus), dan shuttle. Kebijakan ini bukan hanya untuk mengurangi beban parkir, tetapi juga sejalan dengan konsep *green campus*. Meski demikian, masih banyak mahasiswa yang merasa terbatas karena tidak semua area dapat dijangkau oleh bus kampus secara cepat dan fleksibel. Kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan parkir selalu memiliki konsekuensi yang perlu dievaluasi secara berkala.

Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mengalami permasalahan serupa. Kampus UGM yang luas menampung puluhan ribu mahasiswa setiap tahun, sehingga kebutuhan akan lahan parkir menjadi sangat tinggi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah pembangunan gedung parkir bertingkat di beberapa fakultas untuk menampung kendaraan mahasiswa dan dosen. Meskipun investasi pembangunan gedung parkir cukup besar, kebijakan ini dinilai efektif dalam menyediakan ruang parkir yang lebih tertib dan aman. Namun, tantangan yang muncul adalah biaya pemeliharaan gedung serta manajemen keamanan yang harus lebih ketat untuk mencegah kasus pencurian kendaraan.

Universitas Brawijaya (UB) di Malang juga menghadapi persoalan parkir yang serius. Dengan jumlah mahasiswa aktif yang sangat besar, UB beberapa kali menghadapi keluhan mahasiswa terkait keamanan kendaraan, terutama sepeda motor. UB kemudian memperketat sistem keamanan parkir dengan menambahkan kamera CCTV, portal masuk, hingga pemberlakuan kartu parkir elektronik. Langkah ini cukup berhasil meningkatkan rasa aman mahasiswa, meski masih menyisakan persoalan kepadatan di jam-jam sibuk.

Dari beberapa contoh di atas, dapat dilihat bahwa kebijakan parkir di perguruan tinggi memiliki variasi yang sangat luas, mulai dari pembatasan kendaraan, pembangunan gedung parkir, penerapan teknologi keamanan, hingga pemberlakuan sistem parkir berbayar. Semua kebijakan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, tergantung pada kondisi kampus, jumlah mahasiswa, dan luas lahan yang tersedia.

Jika dibandingkan dengan Universitas Lampung, permasalahan parkir yang muncul relatif mirip, yakni tingginya jumlah kendaraan mahasiswa dibandingkan dengan ketersediaan lahan parkir yang terbatas. Namun, kebijakan yang diterapkan UNILA masih lebih sederhana dibandingkan dengan perguruan tinggi besar lainnya. Misalnya, area parkir di sekitar gedung perkuliahan dan perpustakaan belum dikelola secara terpusat dengan sistem keamanan yang memadai, serta belum didukung dengan sarana teknologi seperti CCTV yang merata atau sistem kartu parkir elektronik. Hal ini sering kali menimbulkan kerawanan, baik dari sisi keamanan maupun kenyamanan mahasiswa.

Dengan meninjau pengalaman kampus lain, evaluasi kebijakan parkir di UNILA menjadi semakin penting untuk dilakukan. Hasil evaluasi tidak hanya bermanfaat untuk memperbaiki tata kelola parkir di UNILA, tetapi juga dapat menjadi rekomendasi bagi perguruan tinggi lain yang menghadapi masalah serupa. Evaluasi semacam ini akan memberikan gambaran mengenai sejauh mana kebijakan parkir di UNILA mampu menjawab tantangan yang ada, sekaligus menegaskan komitmen kampus terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.

Universitas Lampung (UNILA) sebagai salah satu perguruan tinggi negeri terbesar di Provinsi Lampung setiap tahun menampung ribuan mahasiswa baru. Jumlah mahasiswa yang terus bertambah ini berbanding lurus dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor yang digunakan sebagai moda transportasi utama. Hal ini menimbulkan konsekuensi langsung terhadap ketersediaan dan kualitas lahan parkir di lingkungan kampus.

Kebijakan yang diterapkan UNILA untuk mengurangi kepadatan kendaraan di area pusat kegiatan akademik, salah satunya adalah dengan menyediakan area parkir terpadu yaitu di shuttle. Konsep parkir terpadu dimaksudkan agar mahasiswa memarkirkan kendaraannya di titik parkir yang telah disediakan, kemudian melanjutkan perjalanan ke fakultas atau gedung kuliah menggunakan transportasi internal kampus. Kebijakan ini sejatinya dirancang untuk menekan kepadatan kendaraan di dalam kampus sekaligus menciptakan lingkungan belajar yang lebih tertib. Namun, dalam praktiknya, banyak mahasiswa menilai bahwa penggunaan

shuttle belum sepenuhnya efektif. Beberapa mahasiswa merasa lokasi parkir shuttle terlalu jauh dari fakultas, sehingga memerlukan waktu tambahan untuk menuju kelas. Kondisi ini seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, terutama pada saat cuaca hujan atau ketika mahasiswa dikejar waktu.

Selain area shuttle, perpustakaan pusat Universitas Lampung juga menjadi salah satu titik parkir yang krusial. Perpustakaan merupakan fasilitas yang paling banyak dikunjungi mahasiswa dari berbagai fakultas, sehingga aktivitas keluar masuk kendaraan berlangsung sangat padat setiap harinya. Keterbatasan kapasitas lahan parkir di sekitar perpustakaan sering menimbulkan praktik parkir sembarangan, sehingga mahasiswa lain kesulitan mendapatkan tempat parkir yang layak. Selain itu, area ini juga rawan dari sisi keamanan, karena beberapa kali terjadi kasus pencurian kendaraan bermotor. Masalah keterbatasan lahan parkir dan kerawanan pencurian inilah yang menjadikan area perpustakaan pusat sebagai titik rawan yang membutuhkan perhatian khusus dalam evaluasi kebijakan parkir di Universitas Lampung.

Permasalahan lain yang cukup mencolok adalah kasus kehilangan sepeda motor di lingkungan UNILA. Berdasarkan pemberitaan dari Teknokra (2025), terdapat laporan kehilangan kendaraan bermotor yang terjadi di area parkir kampus. Kasus semacam ini menimbulkan keresahan mahasiswa, karena parkir yang seharusnya memberikan rasa aman justru memunculkan kekhawatiran. Situasi ini memperlihatkan bahwa sistem keamanan parkir yang ada masih belum berjalan secara optimal. Minimnya pengawasan, keterbatasan jumlah petugas keamanan, serta belum meratanya pemasangan kamera CCTV menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya insiden tersebut.

Sebagai bentuk respons, pihak kampus kemudian menerapkan kebijakan baru berupa kewajiban menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) setiap kali kendaraan keluar dari area parkir. Rektor UNILA, Prof. Lusmeilia Afriani, menegaskan bahwa “setiap kendaraan keluar wajib menunjukkan STNK” sebagai upaya memperketat keamanan dan mencegah praktik pencurian kendaraan bermotor (Kumparan.com). Kebijakan ini diharapkan dapat menutup celah

keamanan yang sebelumnya sering dimanfaatkan pelaku pencurian. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan aturan ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah petugas yang melakukan pengecekan serta kurangnya kesadaran mahasiswa dalam mendukung penerapan aturan tersebut.

Dari perspektif pelayanan publik, kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang direncanakan dengan implementasi di lapangan. Secara normatif, penyediaan lahan parkir dan fasilitas pendukungnya merupakan bagian dari pelayanan kampus terhadap sivitas akademika. Namun, bila pelayanan ini tidak mampu memenuhi harapan pengguna (mahasiswa), maka tingkat kepuasan terhadap kebijakan tersebut akan rendah. Ketidakpuasan mahasiswa dapat terlihat dari berbagai keluhan yang disampaikan melalui media sosial, forum diskusi, maupun laporan ke media kampus.

Selain itu, dari sisi tata kelola, masih terdapat masalah koordinasi antara pihak pengelola kampus, petugas keamanan, serta mahasiswa pengguna layanan parkir. Misalnya, aturan mengenai penggunaan area parkir shuttle tidak selalu dipatuhi, sebagian mahasiswa tetap berusaha membawa kendaraan masuk ke fakultas masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap kebijakan juga masih menjadi tantangan tersendiri. Tanpa adanya sosialisasi dan pengawasan yang konsisten, kebijakan parkir yang dirancang baik sekalipun sulit untuk mencapai tujuannya.

Dengan demikian, permasalahan parkir di UNILA bukan hanya persoalan teknis mengenai keterbatasan lahan, tetapi juga terkait dengan aspek manajemen, keamanan, dan kepuasan mahasiswa sebagai pengguna layanan. Kondisi ini mempertegas urgensi dilakukannya penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan parkir yang ada telah menjawab kebutuhan mahasiswa. Evaluasi yang komprehensif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kelemahan yang ada sekaligus rekomendasi perbaikan ke depan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, jelas terlihat bahwa persoalan parkir di Universitas Lampung tidak dapat dipandang sekadar sebagai masalah teknis. Parkir merupakan bagian dari layanan kampus yang bersinggungan langsung dengan aktivitas

akademik mahasiswa sehari-hari. Ketidaktersediaan lahan yang memadai, keterbatasan kapasitas, hingga lemahnya aspek keamanan, pada akhirnya berdampak pada kualitas pengalaman belajar mahasiswa. Padahal, salah satu indikator utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah terciptanya suasana akademik yang nyaman, tertib, dan aman bagi seluruh sivitas akademika.

Dari perspektif administrasi publik, parkir dapat diposisikan sebagai bentuk nyata pelayanan publik dalam lingkup pendidikan tinggi. Pelayanan publik menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan responsivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam konteks kampus, mahasiswa adalah pengguna layanan yang harus diprioritaskan kepentingannya. Apabila kebijakan parkir tidak mampu menjawab kebutuhan mahasiswa, maka hal ini menandakan adanya gap antara perumusan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan parkir di UNILA menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana tujuan awal kebijakan tercapai, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaannya.

Hal ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi pihak pengelola kampus, khususnya dalam merumuskan kebijakan parkir yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan mahasiswa. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam memperbaiki sistem keamanan, menambah kapasitas lahan, memperluas pemasangan CCTV, maupun meningkatkan kualitas pelayanan shuttle. Dengan demikian, permasalahan yang selama ini menimbulkan keluhan mahasiswa dapat diminimalisasi, bahkan diatasi secara berkelanjutan.

menurut Hermanto Suaib dkk kebijakan publik pada dasarnya merupakan hasil dari amanah konstitusi dan undang-undang yang diwujudkan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, keamanan, hingga pelayanan publik. Dalam hal ini, kebijakan kampus mengenai parkir dapat dipandang sebagai bagian dari administrasi publik yang berfungsi untuk memberikan rasa aman, ketertiban, sekaligus mendukung kegiatan akademik mahasiswa. Dengan kata lain, meskipun kebijakan tersebut bersifat lokal dan spesifik, ia tetap termasuk ke dalam ranah kebijakan publik karena menyangkut pelayanan terhadap kepentingan banyak orang (Hermanto Suaib et al., 2022).

Penelitian ini juga relevan dengan upaya pemerintah dalam mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan non-akademik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menekankan bahwa setiap penyelenggara layanan, termasuk perguruan tinggi, wajib memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan akuntabel. Dengan adanya evaluasi kebijakan parkir, UNILA dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan tidak hanya sekadar ada secara formal, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa.

Dengan demikian, permasalahan parkir di UNILA bukan hanya persoalan teknis mengenai keterbatasan lahan, tetapi juga terkait dengan aspek manajemen, keamanan, dan kepatuhan terhadap kebijakan yang ada. Situasi ini mempertegas urgensi dilakukannya penelitian untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan parkir, khususnya kebijakan pemeriksaan STNK dan penataan area shuttle serta perpustakaan, mampu menjawab kebutuhan mahasiswa. Evaluasi yang komprehensif diharapkan mampu memberikan gambaran tentang kelemahan yang ada sekaligus rekomendasi perbaikan ke depan..

Abdul Karim, M., et al. (2023). Manajemen parkir terpadu di Universitas Hasanuddin. *Jurnal Manajemen Transportasi*, 11(1), 101–120.

Nabal, A. (2020). Evaluasi kebutuhan lahan parkir pada area parkir Kampus FISIP Universitas Atma Jaya Yogyakarta. *Jurnal Teknik Sipil*, 13(1), 32–44.

Priyantika, D., Marom, A., & Nurcahyanto, H. (2022). Analisis kebijakan parkir dalam mewujudkan ketertiban Kota Semarang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan (JIP)*, 7(1), 39–56.

Rachman, T. (2023). Optimasi parkir di Universitas Indonesia menggunakan sistem gate elektronik. *Jurnal Transportasi dan Infrastruktur*, 12(2), 45–60.

Rivai, V., & Sagala, S. (2022). *Administrasi publik: Konsep, teori, dan implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Suaib, H., Rakia, A. S. R. S., Purnomo, A., & Ohoarella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Makassar: Humanities Genius. ISBN 978-623-99581-6-9.

